

4.2 Saran

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II telah membantu memudahkan Administrator dan para pegawai dalam pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, namun masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi informasi dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, maka berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat disampaikan agar dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu :

1. Agar para pegawai dapat mengumpulkan data-data pokok dan data pendukung secara lengkap, sebaiknya pegawai diberikan sosialisasi mengenai data-data yang harus dipenuhi, agar Administrator dapat menjalankan tugasnya dengan baik, cepat, tepat, dan akurat.
2. Sebaiknya menambah jumlah administrator, dikarenakan jumlah pegawai banyak, membuat administrator memerlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan tugasnya.
3. Agar para pegawai dan administrator lebih memahami dari penggunaan SIMPEG sebaiknya perusahaan tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga melakukan *training* atau pembinaan secara lengkap.
4. Sebaiknya terus melakukan pemeliharaan data pegawai dan perangkat SIMPEG agar informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG menjadi lebih akurat dan terpercaya.
5. Sebaiknya melakukan pengembangan dan pemanfaatan fitur-fitur didalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/Kep-5.11/Iii/2017 Tentang Lambang/ Logo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Mukhlis, Suhardi. 2012. *Administrasi Kepegawaian*. LeutikaPrio: Yogyakarta.

Mulyadi, D., & Choliq, A. (2019). Penerapan Metode Human Organization Technology (HOT-Fit Model) untuk Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Persediaan (SIDIA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Teknois: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains, 7(2), 2.

Nafiudin. 2019. *Sistem Informasi Manajemen*. Pasuruan: Qiara Media

Nugroho, Haris Djoko. 2020. *World Class Hydrographer: Evaluasi Pendidikan SDM Hidrografi untuk membentuk SDM Unggul Kelautan Mendukung Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: Pandiva Buku

Nusirwan, I. (2017). Evaluasi Keberhasilan Penerapan Ihs (Isa Hotel System) Menggunakan Metode Hot Fit (Studi Kasus: Hotel Mutiara Merdeka) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 21-23

<https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN> diakses tanggal 30 Mei 2020, pukul 10.00

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sugiyono. 2019. *Metedeologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset

Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.

UR, Dicky Wisnu. 2019. *Teori Organisasi" Struktur dan Desain*. Vol. 1. Malang: UMMPress.